

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 9 dan 19

Hendi Tunda Sejumlah Proyek Pemkot Alami Defisit Anggaran Rp220 Miliar

STORY HIGHLIGHTS

- Pemkot Semarang mengalami defisit anggaran sekitar Rp 220 miliar akibat tingginya nilai defisit karena prediksi nilai Silpa tidak sesuai dengan hasil audit BPK.
- Dalam perencanaan awal tahun 2019, Pemkot Semarang memprediksi Silpa sekitar Rp 400 miliar
- Guna menutup kekurangan tersebut, OPD diminta untuk menunda sejumlah proyek pekerjaan yang belum dilakukan lelang

Hendi Tunda...

■ DARI HALAMAN 9

SEMARANG, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengalami defisit anggaran sekitar Rp 220 miliar. Tingginya nilai defisit karena prediksi nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tidak sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, Silpa yang ditetapkan saat penetapan anggaran 2019 terlalu tinggi. Menurutnya, dalam perencanaan awal tahun 2019, Pemkot Semarang memprediksi Silpa sekitar Rp 400

miliar. Ternyata, hingga penetapan anggaran perubahan, Silpa tersebut tidak mencapai angka itu melainkan selisih sekitar Rp 220 miliar. "Kami mohon maaf ada penyesuaian anggaran yang cukup besar terutama penentuan Silpa yang tidak sesuai dengan hasil audit BPK. Selisihnya sekitar Rp 220 miliar," tutur Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang, Rabu (31/7).

Guna menutup kekurangan tersebut, Hendi akan me-

■ KE HALAMAN 19

merintahkan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menunda sejumlah proyek pekerjaan yang belum dilakukan lelang.

"Beberapa pekerjaan yang belum dilelangkan, kami langsung delete karena pertimbangannya kalau menunggu sampai bulan ini baru dilelangkan pasti tidak akan selesai," ujarnya.

Pihaknya juga akan melakukan upaya rasionalisasi anggaran pada setiap OPD. Menurutnya, upaya tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah pola pengelolaan anggaran. Dengan langkah yang sudah direncanakan, dia yakin bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya rasa itu hal yang wajar dalam sebuah pola pengelolaan anggaran. Pada saat kami merencanakan anggaran untuk berbagai program dengan sumber pembiayaan yang sudah direncanakan, tiba-tiba ada sumber yang tidak memenuhi target maka kami merasionalisasi," paparnya.

Rasionalisasi upaya rasionalisasi, sebutnya, dilakukan setiap OPD seperti merasionalkan anggaran alat tulis kantor (ATK), konsumsi setiap agenda, dan perjalanan dinas. Pihaknya akan mengaktif-

kan dan memprioritaskan anggaran untuk dedicated program di antaranya program Universal Health Coverage (UHC) dan program penyapuan jalan.

"UHC selama ini hanya sepuluh bulan maka dalam anggaran perubahan kami tambahkan anggaran untuk UHC. Program yang lainnya yaitu penyapuan jalan. Itu program dedicated yg kemudian kami tambahkan dalam penyesuaian perubahan anggaran ini," jelas Hendi.

Satu di antara sejumlah proyek Pemkot Semarang yang harus ditunda yaitu Pembangunan Taman Rejomulyo. Taman yang rencananya akan dibangun 2019, terpaksa harus diulur hingga 2020.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Ali mengatakan, sebetulnya detail engineering desain (DED) untuk proyek pembangunan Taman Rejomulyo sudah disiapkan. Namun, proyek yang dianggarkan Rp 2,5 miliar itu harus ditunda karena keterbatasan anggaran Pemkot Semarang.

"Sebetulnya DED sudah, tapi Pak Wali minta disempurnakan karena kemarin belum sempurna. Pada akhirnya kami delete dulu karena melihat kondisi anggaran Pemkot Semarang," paparnya.

Anggaran pembangunan Taman Rejomulyo akhirnya

masuk pada APBD 2020 mendatang. Pihaknya akan segera melelangkan pada awal 2020.

Skala Prioritas Sementara itu, DPRD Kota Semarang mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan rasionalisasi anggaran yang tidak terserap.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mendorong tim anggaran Pemkot untuk segera menginstruksikan kepada seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) yang tidak dapat menyerap anggaran secara baik agar bisa dirasionalisasi. OPD harus membuat skala prioritas terkait program ataupun proyek yang akan dijalankan selama satu semester kedepan.

"Kami amanatnya Pemkot bisa merasionalisasi untuk anggaran yang tidak mungkin terserap. Ketika sudah pembahasan, kami juga ada rasionalisasi terkait anggaran yang terserapnya kecil, dalam penyampaian prognosis 6 bulan ini hingga 6 bulan kedepan," tutur Supriyadi.

Pihaknya juga mendorong Pemkot untuk menunda rencana kegiatan yang tidak mungkin terealisasi tahun ini. Kegiatan maupun proyek yang tidak dapat terealisasi tahun ini bisa dianggarkan pada 2020 mendatang.

"Ini efisiensi yang luar biasa. Jangan sampai performa anggaran besar tapi tidak bisa menutup defisit anggaran yang ada," ujarnya. (eyf)